



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



RAPAT KOORDINASI WACANA PforR PENANGANAN STUNTING

Jakarta, Desember 2017

LATAR BELAKANG

Surat dari Setwapres nomor B-1416/Ka.Setwapres/SM.02.00/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihal **Rencana Dukungan Program for Result Bank Dunia untuk Penanganan Stunting** diantaranya menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan penanganan *stunting* sesuai Arahan Wakil Presiden.

1. Menetapkan struktur pengelolaan dukungan penanganan *stunting* (***National Nutrition Action Plan***) melalui **lima pilar penanganan *stunting***.
2. Menunjuk beberapa penanggung jawab untuk menindaklanjuti pelaksanaan penanganan *stunting* → K/L terkait.
3. Menetapkan **100 kabupaten/kota prioritas untuk percepatan penanganan *stunting***.
4. Mendorong Pemda untuk mendukung percepatan penanganan *stunting*.
5. **Pembahasan antara Wapres dengan Direktur Bank Dunia Perwakilan Indonesia memutuskan untuk meminta dukungan Bank Dunia dalam bentuk *Program for Result (PforR)* melalui :**
 - ❖ Dukungan Finansial → Pinjaman sebesar US\$400juta
 - ❖ *Technical assistance* untuk mendukung pelaksanaan, memperluas, serta inovasi program.
6. Memohon Menkeu untuk mengajukan permohonan PforR untuk penanganan *stunting* kepada Bank Dunia.

LIMA PILAR PENANGGARAN STUNTING

dalam *National Nutrition Action Plan*



PROGRAM INTERVENSI GIZI SPESIFIK

- Kesehatan Ibu
- Kesehatan bayi baru lahir
- Kesehatan anak

PROGRAM INTERVENSI GIZI SENITIF

- Penyediaan air bersih (KEMENPUPERA)
- Sanitasi (KEMENKES)
- Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi (BPOM)
- Keluarga Berencana (BKKBN)
- JKN (KEMENKES)
- Program Jaminan Persalinan (KEMENKES)
- Program konseling orang tua (KEMENKES)
- Program Konseling gizi (KEMENKES)
- Makanan sehat untuk anak usia dini/PAUD (KEMENDIKBUD)
- Program Konseling Reproduksi (KEMENKES)
- Program Perlindungan Sosial (RASTRA & PKH) (KEMENSOS)
- Program Ketahanan Pangan (KEMENTAN)

KERANGKA PENANGANAN STUNTING

1

Intervensi Gizi Spesifik
(berkontribusi 30%)

Intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek.

2

*Intervensi Gizi
Sensitif*
(berkontribusi 70 %)

Intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1.000 HPK.

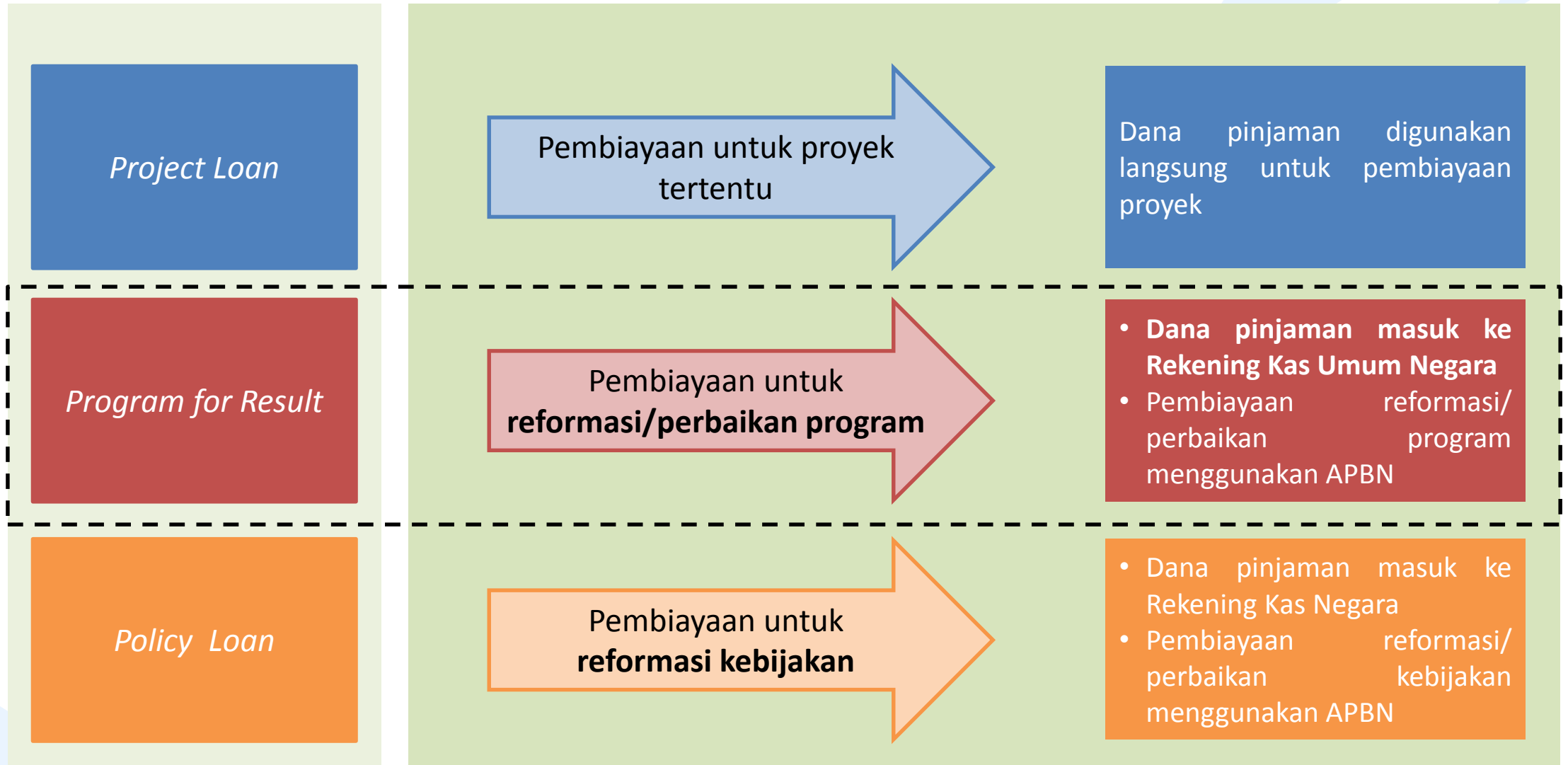
TINDAK LANJUT ATAS SURAT SETWAPRES

13 Desember 2017 ►► Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 2 (Kemenko PMK, Bappenas, TNP2K, Kemenkeu)

Hasil Rapat

1. Peserta rapat menyepakati PforR sebagai instrumen yang digunakan untuk mendorong perbaikan/reformasi program penanganan *stunting*.
2. Beberapa alasan PforR dianggap sebagai solusi yang tepat untuk penanganan *stunting*, diantaranya :
 - ❖ Implementasi PforR fokus terhadap reformasi/perbaikan program;
 - ❖ Jangka waktu pelaksanaan PforR cukup panjang (4 tahun), sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk dapat melihat dampak dari penanganan program;
 - ❖ Salah satu *key features* PforR adalah DLI (*Disbursement Linked Indicator*) dimana pencairan dana akan sangat tergantung pada capaian indikator tersebut
3. Penekanan utama dari PforR bukanlah pinjaman yang besarnya relatif kecil namun fungsinya sebagai alat untuk mendisiplinkan perbaikan/reformasi suatu program untuk mencapai target yang telah ditentukan.
4. Pembiayaan yang berasal dari PforR tidak secara khusus digunakan untuk pada program-program penanganan *stunting*, namun masuk ke rekening Kas Umum Negara.
5. Implementasi penanganan *stunting* melibatkan banyak kementerian/lembaga serta Pemda sehingga penyusunan *Institutional Arrangement* perlu dilakukan secara cermat dan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
6. Pembahasan penyusunan DLI perlu dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan kesiapan lembaga/kementerian/pemda terkait agar tidak berdampak pada kenaikan beban APBN secara signifikan di masa mendatang.
7. Sebagai tindak lanjut direncanakan akan dilaksanakan rapat lanjutan di tingkat Eselon 1 selambat-lambatnya minggu depan, guna penyusunan kesepakatan terkait rencana dukungan Bank Dunia terhadap penanganan *stunting* melalui PforR.

BEBERAPA JENIS PINJAMAN PEMERINTAH



PROGRAM FOR RESULT (PforR)

Konsepsi PforR



Perbaikan Program untuk percepatan pencapaian target
Pembiayaan yang efisien

SETWAPRES/TNP2K

Mengkoordinir dan mengawasi percepatan penanganan stunting untuk mencapai target

BAPPENAS, MENKO PMK

Memastikan capaian program selaras dengan prioritas nasional

KEMENKEU

Mendorong peningkatan efektivitas belanja negara
Mendapatkan pembiayaan

K/L, PEMDA, PEMERINTAH DESA

Melaksanakan program penanganan *stunting*
Mendapatkan *technical support* untuk perbaikan dan penyempurnaan program

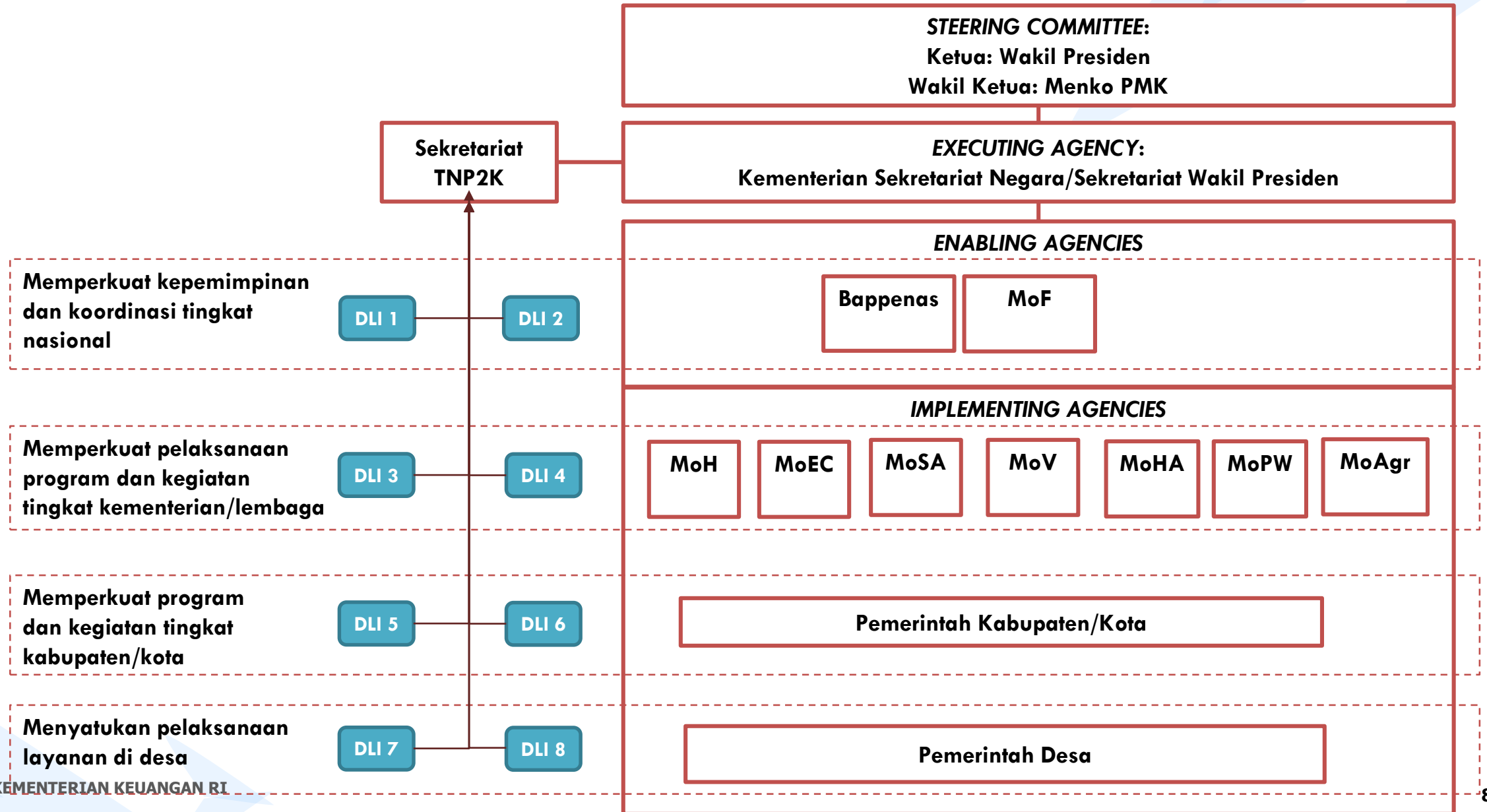
PforR

- Pinjaman sebesar \$400 juta akan dicairkan sesuai dengan hasil verifikasi independen
- PforR menyediakan *dashboard* bagi semua pemangku kepentingan utama untuk mengetahui realisasi kemajuan pelaksanaan berdasarkan hasil pengukuran kinerja Indikator Pencairan Dana (DLI) oleh Bank Dunia

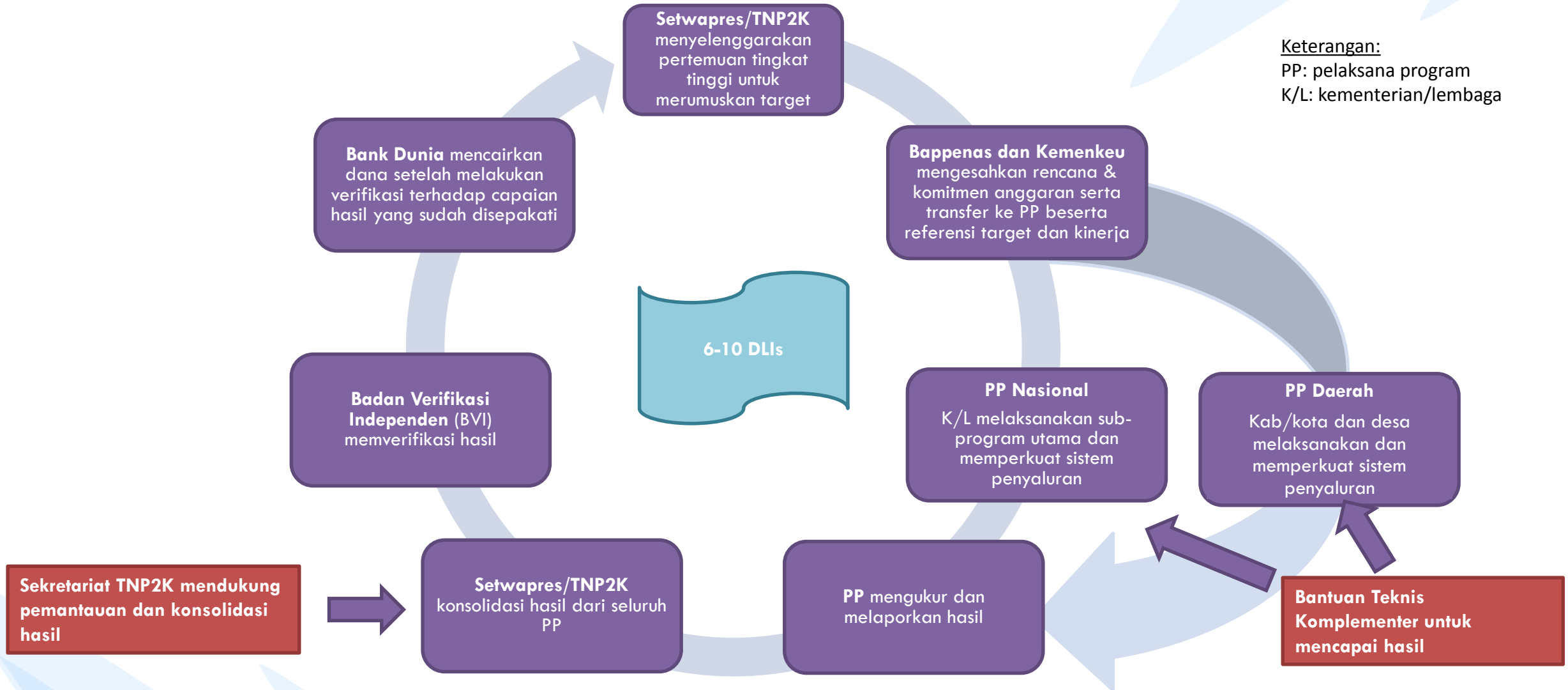


USULAN INSTITUTIONAL ARRANGEMENT

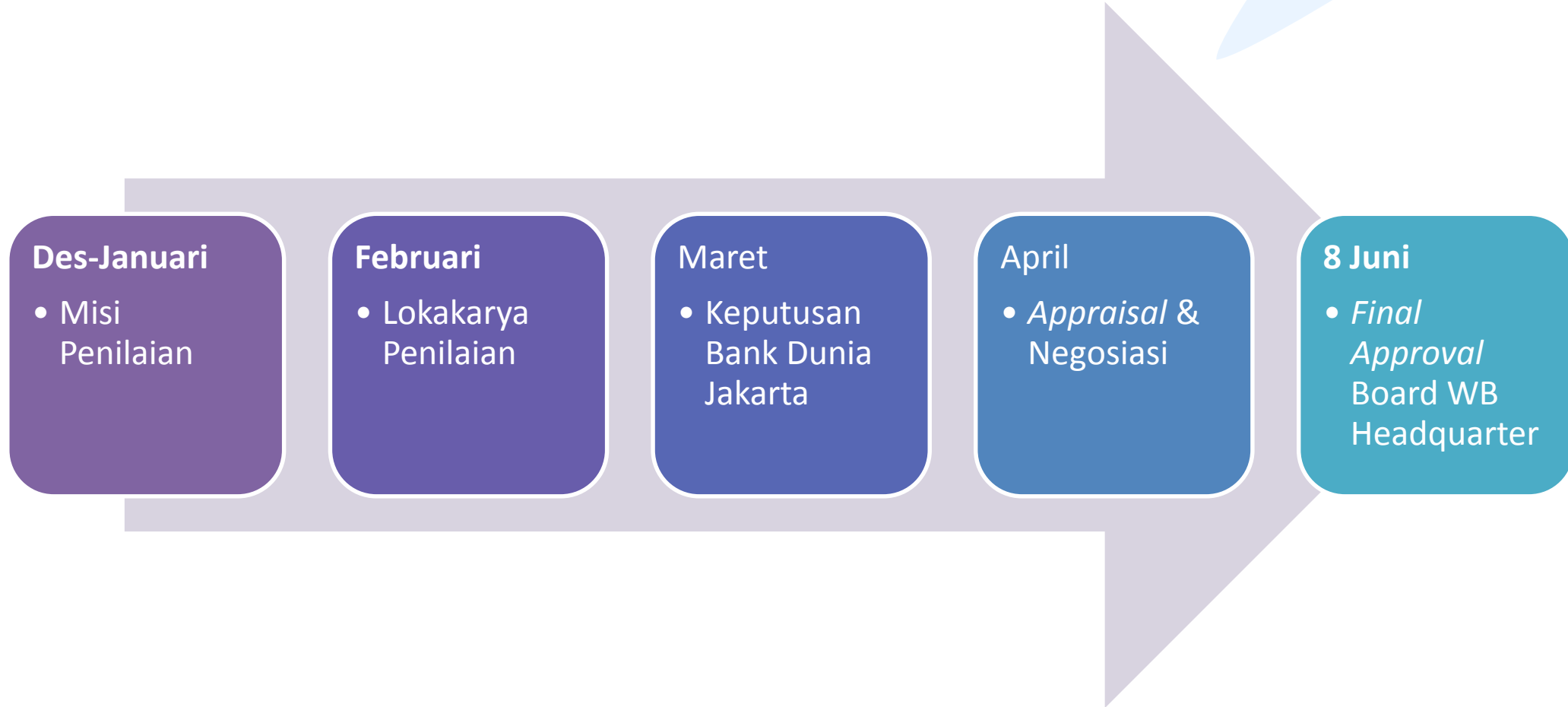
PROGRAM RESULTS AREAS



USULAN SIKLUS PELAKSANAAN



USULAN TIMELINE PERSIAPAN PforR



HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Indikator pencairan (DLI) harus realistis namun tetap memacu perbaikan/reformasi program percepatan penanganan *stunting*.

Penentuan DLI perlu memperhatikan dampaknya terhadap fiskal, karena penentuan DLI yang terlalu ambisius dapat menyebabkan lonjakan kenaikan biaya program dalam APBN.

Peran *executing agency* menjadi krusial bagi keberhasilan program. Untuk itu, perlu dipastikan bahwa TNP2K/Setwapres memiliki kewenangan untuk mendorong dan memastikan seluruh pemangku kepentingan menjalankan tugasnya dengan baik.

Kesiapan K/L terkait dalam mengimplemenastikan berbagai perbaikan program perlu untuk dipastikan, terlebih dalam penanganan *stunting*, melibatkan banyak K/L dan Pemda.

HASIL PEMBAHASAN DAN TINDAK LANJUT



TERIMA KASIH

